

Analisis Kebijakan Presiden Bashar al-Assad dalam Menangani Masalah Keamanan di Suriah Tahun 2019-2020

Oleh :

Siti Aisyah¹

NIM. E1111161044

Elyta², Ori Fahriansyah²

Email : sitiaisyah2303@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

ABSTRAK

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai kebijakan dari Presiden Bashar al-Assad dalam menangani masalah keamanan di Suriah pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Permasalahan keamanan di Suriah sudah terjadi sejak tahun 2011, akan tetapi di tahun 2019 hingga tahun 2020 terdapat beberapa bukti yang mengindikasikan semakin intensnya masalah keamanan di Suriah. Presiden Suriah Bashar al-Assad meluncurkan kebijakan berupa aksi di tahun 2019-2020, hal ini merupakan upaya dari pihak GoS (*Government of Syria*) yang dipimpin oleh Bashar al-Assad untuk menangani konflik Suriah di tahun 2019-2020. Kondisi ini kemudian diteliti dari sisi peran apa yang dilakukan oleh Presiden Bashar al-Assad selaku Presiden Suriah dalam menangani masalah keamanan negaranya baik berupa kebijakan ataupun upaya yang dikeluarkan Bashar al-Assad di tahun 2019-2020. Penulis menggunakan teori *Decission Making* untuk menganalisa peran dari Bashar al-Assad selaku Presiden Suriah dalam menangani konflik di Suriah dengan tiga indikator, yaitu: kondisi politik domestik Suriah pada tahun 2019-2020, kondisi ekonomi dan militer Suriah pada tahun 2019-2020 serta konteks internasional Suriah di tahun 2019-2020. Penelitian ini menghasilkan deskripsi mengenai analisa peran dari Bashar al-Assad dalam menangani konflik Suriah di tahun 2019-2020 serta apa yang melatar belakangi Assad menjalankan peran tersebut secara spesifik di tahun 2019-2020.

Kata kunci: Bashar al-Assad, Masalah Keamanan Suriah, *Decission Making Theory*

ABSTRACT

This research provides an understanding of the policy from President Bashar al-Assad in dealing with security problems in Syria in 2019 until 2020. Security problems in Syria have occurred since 2011, but in 2019 to 2020 there is some evidence that indicates the intensity of Security problem in Syria is getting worse. President of Syria Bashar al-Assad launched an action policy in 2019-2020, this is an effort from the GoS (Government of Syria) who led by Bashar al-Assad to deal the Syrian conflict in 2019-2020. This condition then examined in terms of the role by President Bashar al-Assad as a President of Syria in dealing with his country's security problems in the form of policies or efforts issued by Bashar al-Assad in 2019-2020. The author uses the Decission Making theory to analyze the role of Bashar al-Assad as President of Syria in dealing with the conflict in Syria with three indicators, that is: Syria's domestic political conditions in 2019-2020, Syria's economic and military conditions in 2019-2020 and the international context of Syria in 2019-2020. This research resulted a description of what the role of Bashar al-assad in dealing with the Syrian conflict in 2019-2020 and what motivated Assad to carry out that role specifically in 2019-2020.

Keywords: Bashar al-Assad, Syrian Security Problems, *Decission Making Theory*

A. Pendahuluan

Konflik di Suriah memang sudah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun terhitung sejak *Arab Spring* 2016 silam. Penelitian mengenai konflik di Suriah dari berbagai sudut pandang juga ada banyak sekali disamping berlangsungnya konflik tersebut. penulis melihat masalah keamanan yang terjadi di Suriah sebagai objek utama dalam penelitian ini.

Membahas mengenai kebijakan Assad untuk memenangkan konflik di negaranya akan jauh lebih dipahami jika menarik kronologi historis dari peristiwa *Arab Spring*. Bermula di Tunisia, seorang pedagang kaki lima yang mengalami kesulitan ekonomi melakukan bunuh diri dengan membakar tubuhnya lantaran depresi di depan Gedung Parlemen Tunisia. Aksi tersebut menyebarkan gelombang anti pemerintah di seluruh penjuru negara Arab, menggerakkan terjadinya aksi protes dimana-mana terhadap pemerintah. Sebagaimana negara Arab lainnya, Suriah juga menjadi salah satu negara yang terkena dampak peristiwa tersebut. Upaya pemerintahan Bashar Al-Assad meredam protes masyarakat dilakukan dengan brutal sehingga memicu perang sipil terjadi (Khan 2017, 587).

Semenjak respon pemerintahan Assad saat itu Suriah berada dalam kobaran konflik yang panjang hingga saat ini. Alih-alih bermula dari peristiwa *Arab Spring*, Suriah semakin kompleks dengan kepemilikan kelompok pemberontak, *foreign power* yang terpresentasikan dari intervensi Rusia maupun negara barat lainnya dan kelompok islam militan berhaluan ekstrimis (Khan 2017, 587). Oleh karena itu ada banyak konflik yang tumbuh bersamaan dengan terjadinya *Arab Spring* di Suriah dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda.

Dari September 2018 hingga Agustus 2020, tercatat ada 692 insiden konflik antara kelompok bersenjata di salah satu kota di Suriah yaitu Idlib. Carter Center juga mencatat Jumlah tertinggi insiden konflik terjadi pada Januari 2019,

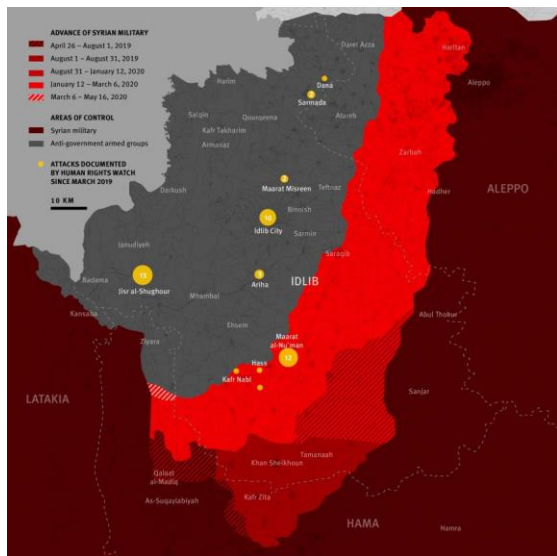
yang mana terdata ada 160 insiden dalam satu bulan (EASO 2020, 62). Adapun jumlah kematian di tahun 2019 ini juga meningkat ekstrim, dilansir dari *Statista Research Department* jumlah warga sipil yang terbunuh dengan jumlah tertinggi kurun waktu dua tahun terakhir terjadi di bulan Juli 2019, total 433 rakyat sipil terbunuh.

Adapun di tahun 2020, ACLED (*Armed Conflict Location and event Data Project*) mencatat di bulan Januari hingga Februari terjadi 1.014 insiden keamanan dimana 765 insiden tersebut adalah serangan jarak jauh atau ledakan dan 235 lainnya adalah pertempuran. ONHCR (*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*) juga memverifikasi bahwa antara 29 April 2019 hingga 15 Januari di tahun 2020 insiden keamanan di Suriah telah merenggut 1.506 nyawa warga sipil, 293 wanita dan 433 anak-anak. Adapun 5% dari total yang di konfirmasi berada di bawah kendali pasukan pemerintah Suriah sendiri, yakni wanita dan anak-anak (EASO 2020, 64).

Pada tahun 2019 seperti yang sudah penulis sebutkan sebelumnya, jumlah kematian warga sipil di Suriah terhitung sangat tinggi dalam kurun dua tahun terakhir sejak 2019-2020. Data tersebut juga menunjukkan bahwa angka fantastis kematian sipil pada juli 2019 tersebut bertepatan dengan terjadinya perang Idlib di salah satu Kota di Suriah. Berdasarkan verifikasi dari Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) telah terjadi penyerangan oleh pasukan Pemerintah dan dilanjutkan dengan adanya gencatan senjata dengan kelompok oposisi.

Dibawah ini merupakan gambar yang menunjukkan penyerangan militer di Suriah dari April 2019 hingga May 2020. Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa serangan yang dilakukan oleh GoS (*Government of Syria*) pada tahun 2019 hingga 2020 jauh lebih mendominasi daripada kelompok oposisi.

Gambar tersebut juga menunjukkan wilayah-wilayah mana saja yang berada dibawah kekuasaan kelompok oposisi maupun pemerintah Suriah.



Sumber: (Human Right Watch, 2020) diakses pada Juli 2021

Akibat adanya konflik, ekonomi Suriah mengalami penurunan sebanyak 70% sejak dimulainya konflik pada tahun 2011 hingga 2017. Suriah harus mengatasi kerusakan infrastruktur, dampak sanksi internasional bahkan inflasi yang tinggi. Hal ini menyebabkan Suriah kekurangan cadangan devisa dan sebaliknya meningkatnya anggaran dan defisit perdagangan karena turunnya daya beli rumah tangga hingga nilai pound Suriah merosot jauh (Factbook, 2020).

Dalam sebuah laporan Bank Dunia yang diterbitkan oleh *European Asylum support Office* tentang situasi sosial dan ekonomi di Suriah menyebutkan bahwa pada tahun 2020 ekonomi di Suriah terkena dampak besar dari konflik berkepanjangan yang terjadi disana. Pada tahun 2019 di bulan desember nilai Pound Suriah menurun dengan cepat, yang berimbas terhadap harga-harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Selain itu kondisi perekonomian Suriah juga diperparah oleh korupsi dan pemerasan yang telah menjadi praktik standar disana (European Asylum Support Office 2020,

26).

Beberapa penelitian seperti karya Ivan Briscoe dkk yang berjudul *"Stability and Economic Recovery After Assad: Key Steps for Syria's Post-Conflict Transition"* menyebutkan bahwa pada periode Bashar al-Assad kolaborasi antara politik dengan bisnis meningkat ekstrim. Hal ini menunjukkan rezim Assad mulai memperkenalkan sejumlah refomasi ekonomi Suriah. Diterapkannya korupsi terkendali sebagai sarana menjamin kelangsungan hidup rezim, serta kolusi sebagai sarana untuk melakukan kontrol terhadap masyarakat. *"A key characteristic of many authoritarian regimes is a tightly knit collaboration between the political elite and the bussiness community."* (Briscoe 2012, 9).

Oleh karena itu penulis akan menganalisa mengenai kebijakan Presiden Bashar al-Assad dalam menangani masalah keamanan yang terjadi di Suriah khususnya di tahun 2019 hingga tahun 2020. Adapun poin utama yang akan penulis ulas dalam penelitian ini, yaitu Kebijakan berupa penyerangan serta kerja sama dengan kelompok dan negara asing dari Bashar al-Assad selaku Presiden Suriah dalam menangani masalah keamanan yang terjadi di negaranya pada Tahun 2019-2020.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian itu sendiri pada umumnya berarti cara untuk mendapatkan data untuk tujuan tertentu dalam sebuah penelitian. Adapun data yang nantinya diperoleh dari penelitian itu adalah data yang bersifat empiris, dalam artian data tersebut sudah harus dipastikan valid, obyektif maupun reliabel (Sugiyono 2011, 3).

Penelitian yang bertemakan Analisis Kebijakan Presiden Bashar al-Assad di Suriah ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana metode ini merupakan jenis penelitian yang bergantung pada pengamatan dan analisis

mendalam. Strauss dan Corbin dalam buku *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* milik Cresswell menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (Rahmat 2012, 2).

Bodgan dan Biklen juga menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif, dengan kata lain data tersebut mencakup ucapan atau tulisan dan perilaku objek yang diamati (Rahmat 2012, 2-3). Ini menunjukkan bahwa penelitian yang menggunakan metode ini diharapkan dapat menghasilkan penjelasan yang mendetail dan mendalam mengenai objek yang diamati. Adapun pengamatan tersebut juga bisa berupa perilaku daripada individu, kelompok, negara atau bahkan organisasi tertentu.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penjelasan eksplanasi, dimana penulis menggunakan format eksplanasi untuk menjelaskan pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel yang lain. Penelitian eksplanasi (*Explanatory Research*) digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari suatu variabel yang dihipotesiskan, sedangkan hipotesis itu sendiri menggambarkan hubungan antara dua variabel untuk mengetahui apakah *independent variable* mempengaruhi *dependent variable* (Mulyadi 2011, 136).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dalam rangka pendeskripsian analisa terhadap kebijakan Presiden Bashar al-Assad dalam menangani masalah keamanan di suriah pada tahun 2019-2020.

Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Decision Making* serta konsep *Responsibility to Protect*, dimana secara lebih luas teori ini

tidak hanya membahas mengenai prinsip-prinsip keamanan akan tetapi juga dapat di implementasikan dalam peran yang dilakukan oleh Bashar al-Assad di negara Suriah. Hal ini juga bisa menjadi tolak ukur dari keamanan Suriah sendiri era pemerintahan Bashar al-Assad pada tahun 2019-2020. Adapun teori *Decision Making* diharapkan mampu menjadi pisau analisis terhadap kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah Suriah khususnya pada masa pemerintahan Assad dalam menangani masalah keamanan di tahun 2019-2020.

C. Pembahasan

Suriah merupakan salah satu negara di Timur Tengah di ujung timur laut Mediterania, di sebelah Utara berbatasan dengan Turki dan di selatan ada Yordania. Di bagian selatan Suriah berbatasan dengan Lebanon dan Israel dan berbatasan langsung dengan Irak di sebelah timur. Suriah memiliki wilayah dengan luas 185.180 km² dan memiliki luas perairan seluas 1.130 km², garis pantai Mediterania pendek sepanjang 193 km yang terbentang di antara Lebanon dan Turki. Wilayah Suriah yang masih terus di duduki Israel juga memiliki luas 1.295 km di daerah Golan yang merupakan dataran tinggi yang cukup strategis. Golan direbut pada tahun 1967 dan baru dianeksasi pada tahun 1981 (Federal Research Division 2005, 4-5).

Negara yang merayakan hari kemerdekaannya pada setiap 17 April ini memiliki beberapa kota-kota besar di antaranya Aleppo, Homs, Hamah, Al Hasakah, Latakia dan Idlib. Sekitar 24,8% Suriah atau seperempat wilayahnya merupakan tanah yang subur di samping fakta bahwa wilayah Suriah merupakan gurun semi-gersang (Jones 2009, 3).

Sistem pemerintahan di negara Suriah telah melakukan reformasi dari sistem Monarki ke Republik. Perubahan tersebut terjadi disaat Suriah dapat mengambil hak kedaulatan negaranya atas Prancis. *The Syrian National Congress*

diketahui telah membuat pernyataan dengan tegas yang menandai kebangkitan negara Suriah. *The Syrian National Congress* mempunyai kedudukan sebagai majelis konstituante, yang bertugas merundingkan dan menyetujui sebuah konstitusi untuk kerajaan pada tanggal 5 Juli 1920. Dari kongres tersebut juga lahirlah pemerintahan dengan sistem pemerintahan Republik untuk pertama kalinya di Suriah, yakni pada tahun 1928.

Sistem pemerintahan Suriah selanjutnya menyediakan sistem pemerintahan parlementer, dimana Presiden dipilih secara tidak langsung, legislatif unikameral serta pengadilan tinggi dengan 15 hakim. Perubahan sistem pemerintahan yang di anut Suriah ini tidak menjadikan Suriah lebih baik dari sebelumnya dalam konteks keamanan negara, hal ini dikarenakan Suriah sudah mengalami beberapa kudeta semenjak perubahan sistem pemerintahannya itu.

Kudeta tersebut berakhir setelah kepemimpinan Presiden Hafez al-Assad pada tahun (1971-2000) yang kemudian digantikan dengan Presiden Bashar al-Assad yang menjabat hingga saat ini di tahun 2021. Rezim Bashar al-Assad juga memiliki banyak prestasi disamping kasus pemberontakan sejak tahun 2011, Bashar al-Assad mampu meningkatkan HDI (*Human Development Index*) di negara Suriah (Muhammad 2016, 85).

Rentetan peristiwa di Timur Tengah berdasarkan kondisi politik dan ideologis bermula dari peristiwa *Arab Spring* yang mulai terjadi di negara-negara seperti di Tunisia, Mesir, Bahrain, Libya, Lebanon, Maroko, Yaman dan Suriah. Negara-negara tersebut mengalami kekacauan karena masyarakat berusaha melengserkan pemimpin yang dianggap otoriter melalui *Arab Spring*, yang mana sudah menggulingkan rezim Zein El-Abidine Bin Ali di Tunisia, Mu'ammarr Al-Qadafi Presiden Libya, dan Presiden Mesir Hosni Mubarak (Afzal 2007, 1-10).

Suriah merupakan salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang

terdampak peristiwa *Arab Spring*. Peristiwa *The Arab Spring* (Musim Semi Arab) sendiri dikenal sebagai kondisi hadirnya harapan untuk melakukan revolusi demi mencapai kehidupan yang lebih baik dengan sistem yang demokratis (Sahide 2015, 118). Peristiwa ini adalah pemacu bagi masyarakat Arab untuk menyuarakan keinginan sistem pemerintahan yang lebih sehat dengan memaksa mengakhiri pemimpin tiran dan diktator yang selama ini memimpin beberapa negara di kawasan Arab.

Nama *Arab Spring* adalah istilah politik yang diberikan atas pergolakan wilayah di kawasan Arab, rakyat menyebutnya *al-Tsaurat al-Arabiyyah* yang juga memiliki arti “revolusi”. Di Suriah pergolakan masyarakat dalam menentang kepemimpinan keluarga Assad (Hafedz al-Assad – Bashar al-Assad) bermula sejak tahun 2011. Berawal dari bangkitnya protes dari masyarakat Suriah yang pro-demokrasi, Presiden Bashar al-Assad menggunakan kekerasan untuk meredam demonstrasi, bahkan tidak segan menggunakan militer secara ekstensif. Respon yang demikian membuat semangat masyarakat Suriah terpancing (Sahide 2015, 119).

Di tahun yang sama dengan bermulanya protes di Suriah, milisi oposisi mulai terbentuk dan meluas. Kelompok milisi oposisi menjadi terlibat dalam perang saudara melawan militer Suriah yang berada dibawah kepemimpinan Bashar al-Assad. Kondisi ini menjadi semakin parah dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Hingga tahun 2019-2020, Bashar al-Assad masih terlibat peperangan dengan milisi oposisi untuk mempertahankan kekuasaannya.

Suriah masih berada dalam kubangan konflik hingga saat ini (2019-2020) dengan kompleksitas alasan yang luas. Negara ini ditarik kedalam konflik yang bersumbu pada peristiwa *Arab Spring*. Sebuah masa dimana terjadi banyak kerusuhan sosial yang memaksa untuk melakukan revolusi politik, dan

peristiwa ini terjadi hampir di seluruh negara Arab (Morris 2012, 1). Peristiwa *Arab Spring* ini membawa perspektif masyarakat sipil Suriah terhadap kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad saat itu, sehingga secara tidak langsung peristiwa ini sudah menjadi wadah untuk menyuarakan kemauan masyarakat.

Pergolakan politik yang cukup ekstrim membuat Presiden Bashar al-Assad mengambil tindakan yang tidak kalah kontroversial dalam merespon demonstran yang melakukan demonstrasi (Lesnussa 2017, 3).

Akan tetapi tindakan ekstrem yang dilakukan oleh Presiden Bashar al-Assad merupakan kebijakan yang di ambil untuk meredam perbedaan pendapat sehingga terciptanya stabilitas nasional di Suriah. Pada saat maraknya demonstran pasca menjalarnya peristiwa *Arab Spring*, Presiden Suriah Bashar al-Assad memang berlomba dengan waktu untuk menekan balik tekanan yang sudah ada sebelum *Arab Spring*. Yakni kasus terorisme baik dari dalam negara seperti kelompok oposisi dan juga dari luar negaranya seperti ISIS (Ramadhansyah 2017, 5).

Kondisi politik Suriah di tahun 2019 hingga 2020 masih tidak jauh berbeda dengan keadaan di tahun-tahun sebelumnya. Negara ini masih berjuang melepas perangkap *civil war* antara pihak oposisi dan rezim Assad beserta aliansinya. Pernyataan ini didasarkan pada peristiwa serangan wilayah Idlib oleh pihak GoS (*Government of Syria*) yang berjuang merebut kembali wilayah itu.

Akan tetapi stabilitas negara sudah berjalan hampir di sebagian besar wilayah Suriah. Sejak diresmikannya perjanjian Perdamaian Jenewa (*The Geneva Piece Agreement*) sebagian besar sektor keamanan sudah dikendalikan oleh unit federal yakni pemerintah Suriah sendiri. Sedikit stabilitas ini tercipta karena beberapa wilayah sudah mempertahankan dan mengembangkan wilayahnya masing-masing, seperti kelompok oposisi Sunni yang mendirikan pemerintahan sendiri di

bagian selatan Suriah, etnis Kurdi di Timur Laut Suriah dan Gos (*Government of Syria*) sendiri menguasai hampir 60% wilayah di Suriah pada tahun 2019 (Meijinders 2017, 11).



Sumber: (Liveuamap, 2019)

Dari gambar di atas dapat dikatakan bahwa pemerintah Suriah atau rezim Bashar al-Assad jauh lebih mendominasi daripada kelompok lain. Kelompok Oposisi yang bertanda hijau merupakan kelompok pemberontak yang menolak kepemimpinan rezim Bashar al-Assad. Etnis kurdi yang tertanda sebagai *Kurdish Control* hampir menyapu sebagian besar wilayah kekuasaan Pemerintah Suriah. Adapun kelompok lain yang bisa diklasifikasikan mulai ada penurunan adalah ISIS (IS) dan kekuatan Turki *Turkish Control*.

Wilayah kekuasaan rezim Assad belum juga optimal secara politis, kasus korupsi dan lemahnya struktur pemerintahan masih menjadi ciri khas dari Gos (*Government of Syria*). Bahkan kondisi masyarakat sipil dalam teritori pemerintah masih belum bisa keluar dari penderitaannya karena layanan dasar dan infrastruktur yang hancur baru memulai rekonstruksi (Meijinders 2017, 11).

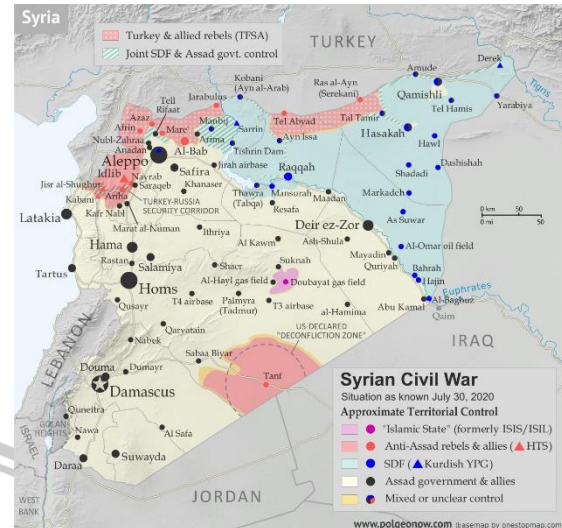
Pemerintahan Presiden Bashar al-Assad memiliki kendali atas sebagian besar wilayah Suriah, keamanan mulai terlihat akan tetapi pertempuran di fokuskan ke wilayah Raqqa dan Idlib. Aliansi militer pemerintahan Assad di Suriah bekerja sama dengan Rusia kembali beroperasi untuk merebut wilayah Idlib

secara politis. Pasalnya obsesi Presiden Bashar al-Assad atas utuhnya negara Suriah yang dipimpinnya mengharuskan seluruh wilayah Suriah berada dibawah kekuasaan rezim. Tidak hanya itu, kondisi pergerakan kelompok oposisi dan pemberontak semakin gencar melakukan serangan gerilya yang menargetkan terhadap masyarakat sipil Suriah (www.kompas.com, diakses pada 1 April 2021).

Pada tahun 2020 kondisi politik domestik di Suriah semakin meluas dibawah kekuasaan pemerintah Suriah yakni Bashar al-Assad sebagai Presiden. Akan tetapi warga sipil Suriah menghadapi tindakan represif rezim Bashar al-Assad. Pelanggaran hak asasi manusia dibawah kekuasaan GoS (*Government of Syria*) masih terus berlanjut dibawah naungan serangan Idlib oleh militer Suriah beserta aliansinya (www.hrw.org, diakses pada 1 April 2021).

Demi terciptanya kondusifitas politik di negaranya, Presiden Bashar al-Assad dengan kewenangannya meredam setiap riak perbedaan pendapat di atas wilayah teritorialnya di Suriah. Assad tidak memberi kesempatan sedikitpun untuk terbentuknya pemberontak baru di wilayah yang kembali di bangunnya semenjak perang sipil Suriah berlangsung sejak 2011. Kekuasaan Assad untuk meredam perbedaan pendapat ini di represikan melalui penangkapan, penyiksaan, penyitaan properti secara ilegal bahkan memberi akses terbatas terhadap warga Suriah yang ingin kembali dari pengungsian.

Di tahun 2020, isu politik di Suriah diwarnai dengan perebutan wilayah teritorial. Akan tetapi luas wilayah kekuasaan masing-masing kelompok tidak mengalami perubahan yang cukup besar. Hal ini dapat terlihat pada peta di gambar dibawah ini.



Sumber: (www.polgeonow.com) diakses pada 1 April 2021

Penyerangan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Suriah untuk mendapatkan wilayah teritorial yang masih berada dibawah kendali kelompok oposisi tidak menghasilkan perubahan yang besar. Berdasarkan gambar 5.1.2 hanya ada penyusutan di wilayah kendali IS (ISIS) di sekitar ladang Gas Doubayat. Namun patroli aliansi GoS(*Government of Syria*) yang terdiri dari Rusia-Turki mulai membentuk sistem keamanan di sepanjang Idlib.

Aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah dalam menerapkan kebijakannya untuk merebut wilayah yang tersisa di tangan pihak oposisi dapat dianalisis dari teori pengambilan keputusan dari faktor keadaan politik domestik Suriah. Meskipun kekuasaan Pemerintah Suriah mencakup 80% di Suriah pada tahun 2019, Presiden Bashar al-Assad tidak ingin kekuatan pihak oposisi dan pemberontak di beberapa wilayah di Suriah semakin membesar dan mengancam teritorial kekuasaan politis yang sudah digenggam Assad.

Di sektor ekonomi pada tahun 2019, pemerintah Suriah mengalokasikan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi sebanyak jutaan dolar dana internasional. Menurut laporan kantor PBB *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) terdapat sekitar 11,7 juta orang di Suriah yang membutuhkan bantuan

kemanusiaan dan perlindungan pada tahun 2019. Akan tetapi pemerintah Suriah justru mengenyampingkan kebutuhan vital penduduk, data yang diterima menunjukkan pemerintah Suriah justru berkonsentrasi terhadap rekonstruksi untuk kepentingan pribadi (www.hrw.org) diakses pada 2 April 2021.

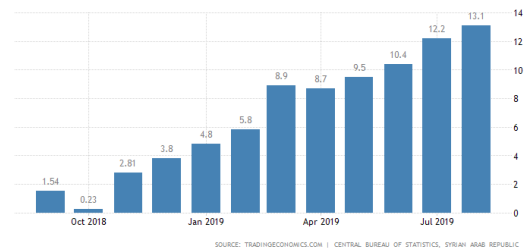
The United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) menganalisa sektor ekonomi Suriah selama terjadinya konflik sangat tinggi, bahkan mengalahkan pembiayaan perang di Suriah mencapai kerugian sebesar USD 226 miliar. Kondisi ekonomi Suriah tidak berhenti di luasnya pembiayaan perang, akan tetapi jumlah kematian dan hancurnya infrastruktur menciptakan jumlah pengungsi internal (IDPS- Internally Displaced Person) yang tinggi (Devadas 2019, 5).

Di Suriah terdapat sekitar 6,1 juta pengungsi internal pada tahun 2020, sebanyak 900.000 orang mengungsi akibat serangan Pemerintah Suriah di Idlib. Laporan Bank Dunia pada tahun 2020 juga menyatakan hancurnya ekonomi Suriah searah dengan banyaknya korban jiwa. Produk Domestik Bruto (PDB) Suriah merosot drastis dan nilai mata uang pound Suriah mengalami inflasi yang hebat. Imbasnya adalah naiknya harga barang-barang primer dan hal ini sangat menyiksa masyarakat Suriah yang baru saja bangkit (EASO 2019,24).

Suriah juga menanggung sanksi internasional akibat pelanggaran-pelanggarannya selama masa perang, pemblokadean ekonomi juga menjadi pemicu kolapsnya ekonomi Suriah. Pada tahun 2019 dilansir dari Bloomberg News dinyatakan bahwa Suriah membutuhkan paling tidak 250 USD Dolar untuk kembali membangun ekonominya. Dampak yang paling krusial terlihat pada masyarakat sipil yang bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan logistik mereka. Pengangguran melejit, pemerintah kewalahan memutar perekonomian negara meskipun beberapa tindakan seperti pemadaman listrik sudah

dilakukan akan tetapi tidak memberikan peluang perekonomian Suriah akan bangkit dalam waktu dekat (www.cnbcindonesia.com) diakses pada 1 April 2021.

Pada bulan Agustus 2019, *tradingeconomics.com* sudah menyatakan tingkat inflasi Suriah mencapai 13,10%. Hal ini merupakan pukulan terbesar bagi Suriah semenjak terjadinya *civil war* di Suriah.



Sumber: (www.tradingeconomics.com) diakses pada 1 April 2021

Pada intinya di tahun 2019-2020, Suriah dihadapkan oleh kolapsnya kondisi ekonomi dan sanksi internasional di bidang ekonomi. Akan tetapi di tahun 2019 hingga 2020 kolapsnya ekonomi Suriah sebagian besar juga karena keputusan yang diambil oleh pihak GoS (*Government of Syria*) yang berusaha merebut kembali wilayah Suriah yang hingga saat itu masih berada dibawah kekuasaan pihak oposisi. Akan tetapi kebijakan yang juga berdampak buruk terhadap ekonomi tersebut jika dilihat dari teori pengambilan keputusan dari faktor ekonomi, Pemerintah Suriah khususnya Presiden Bashar al-Assad dihadapkan pada kondisi perekonomian Suriah saat pihak oposisi maupun kelompok militan masih tersisa di negara itu. Pihak oposisi tidak segan merusak infrastruktur dan area vital di Suriah yang berimbas terhadap perekonomian Suriah sendiri. Selain itu pihak oposisi dan kelompok militan yang tersisa sebagian besar berada di wilayah strategis Suriah seperti Kota Idlib, Aleppo dan lain-lainnya. Hal ini juga menghambat gerak perekonomian yang akan dijalankan oleh Pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah, sehingga diambil kebijakan tersebut.

Berbicara mengenai kondisi militer Suriah, berarti disini adalah militer yang berafiliasi dibawah kekuasaan GoS (*Government of Syria*). Ada banyak prediksi mengenai kekuatan pihak oposisi Suriah yang kuat mampu mengalahkan Rezim Bashar al-Assad. Akan tetapi prediksi ini juga bisa dibantah dengan kekuatan militer pemerintah Suriah yang besar. Kekuatan suatu militer tidak bisa hanya diukur berdasarkan kuantitas, melainkan ada banyak faktor yang bisa menjadi tolak ukur kekuatan suatu militer.

Assad memiliki pasukan dengan loyalitas yang tinggi, pendukung pro Assad merupakan antek yang setia dan mendukung kepemimpinan Bashar al-Assad dengan banyak alasan. Fakta menyebutkan bahwa tentara Suriah merupakan salah satu pasukan terbesar dan paling terlatih di kawasan Arab, terlepas dari reputasi yang buruk melawan Israel, pasukan Suriah merupakan pasukan yang dikenal sebagai kekuatan yang disiplin dan termotivasi berkat doktrin Soviet (Holliday 2013,5).

Suriah memiliki lima divisi khusus angkatan Darat Suriah termasuk diantaranya *4th Armored Division*, *The Republican Guard*, dua Pasukan divisi khusus, dan pasukan cadangan angkatan darat ke-17. Divisi ini menyimpang dari struktur konvensional di atas, yang terdiri dari brigade dan resimen manuver. Resimen infanteri, baju besi dan pasukan khusus ini masing-masing terdiri dari sekitar 1.500 tentara, dibagi menjadi tiga batalyon yang terdiri dari 300 hingga 500 tentara. Resimen ini tidak termasuk elemen pendukung tempur tambahan Brigade dan Resimen Barat Konvensional dan lebih besar daripada batalyon barat. Untuk menghindari adanya pengkhianatan dari pihak militer, Bashar al-Assad hanya mengerahkan elemen angkatan darat yang paling setia. Pasukan yang setia ini terbatas pada mayoritas Alawit.

Keberadaan dari militer milik Suriah dibawah kewenangan GoS (*Government of Syria*), memiliki tujuan

terpusat terhadap pemimpin di Suriah yakni Presiden Bashar al-Assad, dimana Assad menginginkan terbentuknya kembali persatuan di Suriah tanpa adanya jaringan radikalisme seperti teroris maupun pemberontak yang notabenenya menentang sistem pemerintahan Suriah dibawah Presiden Bashar al-Assad.

Sedangkan kelompok oposisi dibawah aliansinya masing-masing baik di dalam maupun luar negeri, memiliki tujuan untuk terciptanya reformasi politik di Suriah yang dimaksudkan terhadap penggantian Presiden Bashar al-Assad beserta koalisinya dari kekuasaan Suriah, kelompok oposisi lain juga memiliki beberapa alasan berbeda dengan kepentingannya masing-masing di Suriah.

Selanjutnya, dapat disebutkan bahwasannya militer di bawah kekuasaan Bashar al-Assad atau GoS (*Government of Syria*) juga menyumbangkan jumlah korban jiwa terhadap rakyat sipil di Suriah selama terjadinya perang. Tidak hanya militer pemerintah, akan tetapi militer-militer dari pihak oposisi juga ikut berperan. Berikut data yang menunjukkan kelompok militer baik pihak pemerintah Suriah maupun oposisi yang menjadi dalang dibalik korban sipil Suriah di tahun 2020.

Militer dibawah kekuasaan Pemerintah Suriah menduduki posisi paling tinggi sebagai oknum yang membuat korban jiwa terbanyak dari rakyat sipil di Suriah pada tahun 2020. Data yang menyebutkan *Syrian Government* tersebut tidak termasuk pihak koalisi pemerintah Suriah seperti Iran atau Rusia. Kelompok militer yang kemudian menjatuhkan korban yaitu kelompok oposisi, akan tetapi jumlah milik kelompok oposisi bahkan masih sangat jauh dari korban yang ditimbulkan oleh pemerintah suriah.

Kondisi yang menempatkan pemerintah Suriah sebagai aktor yang menambah tingginya korban jiwa pada tahun 2020 disebabkan oleh kebijakan dari Presiden Bashar al-Assad yang kemudian

bertujuan merebut wilayah lain yang masih berada dibawah kekuasaan kelompok oposisi dan kelompok militan anti-GoS (*Government of Syria*). Akan tetapi dapat ditarik juga bagaimana kondisi militer sebelum diambilnya kebijakan tersebut oleh Presiden Bashar al-Assad, dimana Bashar al-Assad memiliki potensi yang tinggi di sektor militer yang memungkinkan pihaknya untuk melakukan kebijakan berupa perebutan wilayah yang masih berada di bawah kekuasaan kelompok oposisi dengan cara penyerangan.

Rezim Bashar al-Assad bertahan di Suriah dengan *backup* dari negara seperti Rusia, Iran dan kelompok yang bernama Hizbullah. Akan tetapi Bashar menguasai Suriah hanya sebagian dari negara itu saja, bahkan di wilayah kekuasaannya sendiri pemerintahannya sangatlah lemah. Hal ini dikarenakan banyak warga sipil yang tidak mendukung pemerintahan Bashar al-Assad, sehingga di beberapa wilayah yang dikuasainya memiliki kemungkinan terjadi pemberontakan yang tinggi (Lucas, 2018).

Adapun negara-negara Eropa tidak memiliki peran politik diluar kepentingan Amerika maupun Rusia. Cenderung bersikap netral, negara di Eropa hanya menerima resolusi untuk pencegahan perang dan ketidakstabilan yang sudah disepakati oleh Amerika atau Rusia. Akan tetapi peran yang demikian dinilai cukup pasif, meskipun Uni Eropa tetap memberikan bantuan kemanusiaan terhadap warga Suriah, Uni Eropa dan negara-negaranya tidak memberikan tekanan apapun secara militer terhadap Bashar al-Assad. Tidak hanya bantuan kemanusiaan, bantuan non kemanusiaan meliputi pemerintahan, pendidikan dan mata pencaharian penduduk. Akan tetapi Uni Eropa memberikan bantuannya hanya di wilayah di bawah kekuasaan rezim Assad atau goS (*Government of Syria*). Meskipun begitu Uni Eropa sudah mengeluarkan pernyataan dengan tegas tentang posisinya yang netral tanpa memihak kelompok oposisi ataupun

kelompok pemerintah Suriah.

Bashar al-Assad bersama dengan pasukan koalisi Iran dan Rusia melakukan serangan harian secara rutin sejak April 2019. Sebagai bentuk penyelesaian konflik dari pihak pemerintah Suriah untuk meredam perbedaan di kalangan masyarakat Suriah terkait pemerintahan Bashar al-Assad. Dalam prosesnya untuk mencapai stabilitas keamanan Suriah yang bebas dari oposisi dan pemberontak, pihak Assad juga melakukan penggempuran dengan cara yang terlarang. Berdasarkan artikel yang diterbitkan *Human Rights Watch* yang berjudul Syria Events of 2019 disebutkan bahwa pasukan Suriah dan Rusia menggunakan munisi tandan yang sudah jelas dilarang secara internasional maupun senjata pemusnah massal lainnya. Aliansi Bashar al-Assad yang terdiri dari pasukan Rusia dan Iran ini juga melakukan improvisasi terhadap sekolah, rumah warga sipil, gedung-gedung rumah sakit dan kota utama di wilayah Idlib (HRW, 2019).

Akibat tindakan serangan oleh aliansi Bashar al-Assad atas kelompok oposisi di Idlib, kelompok pemberontak di Idlib juga melakukan penyerangan yang tidak kalah ekstrem. Yang menjadi korban kejahatan perang disini adalah rakyat sipil. Pelanggaran atas hak asasi manusia pada akhirnya juga disandangkan pada pihak GoS (*Government of Syria*).

Di awal tahun 2020 setelah melakukan perang membabi buta di tahun 2019 di Kota Idlib, Bashar al-Assad kembali berkonsentrasi untuk merebut sisi barat laut Idlib yang masih berada di luar genggamannya. Bagian barat laut dari Idlib masih berada dibawah tangan kelompok oposisi yang juga di dukung oleh Turki, milisi Kurdi dan kelompok militan lainnya. Akan tetapi Bashar al-Assad tidak mundur dari kesepakatannya. Bashar al-Assad sudah bertekad untuk menguasai kembali setiap inci dari negara Suriah dan menghapus jejak terorisme dan kontra pemerintah. Perang di awal tahun 2020 ini juga tidak dapat dihindari.

Intensitasnya juga tidak kalah ekstrem dengan serangan pemerintah pada tahun 2019 sehingga krisis kemanusiaan akibat keputusan Assad ini terjadi lagi (WPR, 2021).

Berdasarkan teori pengambilan keputusan (*Decision Making*), dapat kita lihat bagaimana Bashar al-Assad mengambil keputusan terkait tujuannya untuk menstabilkan Suriah secara keseluruhan. Jika ditinjau secara teoritis Bashar al-Assad bisa dipengaruhi oleh tiga faktor, yang mana rinciannya akan penulis jelaskan dibawah ini:

pertama, yaitu kondisi politik domestik di Suriah, pada tahun 2019-2020 Suriah mengalami kekacauan politik yang diawali dengan peristiwa *Arab Spring*. Gelombang yang membawa perbedaan persepsi terhadap kepemimpinan Bashar al-Assad di Suriah diwarnai dengan ketegangan dan konflik yang terus terpacu selama bertahun-tahun.

Kedua, kapabilitas ekonomi dan militer negara Suriah. Perekonomian di masa perang sudah pasti memiliki konsekuensi yang berat. Hancurnya infrastruktur dan tidak stabilnya perputaran pasar membuat Suriah juga memiliki masa terpuruk ekonominya. Ditengah kericuhan konflik dan pemaksaan untuk menurunkan Presiden Bashar al-Assad dari tampuk kepemimpinannya di Suriah, ekonomi yang merosot bersamaan dengan konflik semakin memudahkan citra presiden Bashar al-Assad di mata rakyat sipil Suriah. Di bidang militer yang juga terpecah menjadi dua, militer yang merupakan pasukan dibawah rezim Assad juga bertarung dengan kelompok-kelompok ekstrimis yang berubah menjadi pasukan berkedok pemberontak. Ditambah lagi kedatangan kelompok militan lain dengan tujuan yang berbeda di Suriah contohnya konflik *ethnoreligious* yang dimainkan oleh Arab Saudi dan Iran. Presiden Bashar al-Assad harus mengambil kebijakan yang bisa mengalahkan pihak oposisi agar sipil tidak

lagi terpecah menjadi dua kubu.

Ketiga, konteks internasional Suriah sendiri. Presiden Bashar al-Assad selaku pemimpin tertinggi di pemerintahan Suriah sejak awal mendapatkan suplai bantuan ekonomi maupun militer dari Iran, Hizbullah dan juga Rusia. Hal ini juga menjadikan Assad harus mendapatkan tujuan yang selaras dengan negara-negara aliansinya tersebut. Rezim Assad tidak hanya memiliki keterikatan mendasar dengan aliansinya tersebut, akan tetapi tujuan akhir dan kebijakan yang di ambil oleh Presiden Bashar al-Assad jelas akan mendapat latar dari negara aliansi terkait. Bahkan meskipun tujuan Bashar al-Assad untuk menstabilkan Suriah menggunakan cara yang melanggar hukum dan hak kemanusiaan warga sipil Suriah sendiri.

D. Simpulan

Kondisi politik domestik Suriah termanifestasikan dalam masalah keamanan Suriah yang kompleks terhitung sejak tahun 2011 saat pemberontakan dan kecaman terhadap presiden Bashar al-Assad terjadi berpengaruh terhadap kondisi politik domestik Suriah sendiri. Konflik yang terjadi tidak hanya tentang sebatas penurunan kekuasaan Bashar al-Assad atas Suriah. Akan tetapi alasan-alasan konflik terjadi disana sudah bermutasi dan saling tumpang tindih. Untuk lebih memfokuskan penelitian penulis membuat limitasi waktu penelitian ini dalam rentang tahun 2019-2020.

Kondisi ekonomi Suriah semakin memburuk bersamaan dengan tingginya intensitas kekuatan militer yang berperang dalam konflik Suriah pada tahun 2019-2020 merupakan manifestasi dari kebijakan yang diambil oleh Presiden Bashar al-Assad. Kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk menstabilkan kembali negara Suriah dengan cara pembersihan beberapa wilayah yang masih ada ditangan pemberontak maupun pihak oposisi. Pada tahun tersebut (2019-2020) Presiden Bashar al-Assad sudah mampu merebut kembali sebagian besar wilayah di Suriah, akan tetapi belum bisa

menaklukkan kelompok pemberontak sepenuhnya. Berangkat dari tujuan awal yang ingin menghapus terorisme dan juga pemberontak dan oposisi yang menentang Presiden Bashar al-Assad, pemerintah Suriah secara tegas dan tanpa mengulur waktu lagi memberantas wilayah-wilayah yang masih diduduki oleh kelompok oposisi. Pemerintah Suriah tidak bekerja sendiri, aliansi luar negeri yang dari awal konflik menjadi tameng bagi Presiden Bashar al-Assad juga ikut berpartisipasi hampir dalam setiap aspek.

Penyerangan besar-besaran ini direalisasikan pada tahun 2019-2020, tepatnya Presiden Bashar al-Assad dan GoS (Government of Syria) menyerang wilayah Idlib. Salah satu kota strategis dan merupakan kegubernuran di Suriah. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penyerangan ini dilakukan tanpa pandang bulu. Tidak ada pemberitahuan atau semacamnya sehingga korban dari rakyat sipil berjatuh dan meningkat drastis. Presiden Bashar al-Assad mendapatkan kecaman dari dunia internasional, akan tetapi seakan menutup telinga pemerintahan Bashar al-Assad masih terus melanjutkan penerapan kebijakan tersebut. Alasannya adalah pembersihan tidak bisa dilakukan secara merata jika bukan dengan cara penyerangan tanpa pandang bulu. Banyak kelompok militan dan oposisi yang akan menyamar menjadi warga sipil dan pada akhirnya membentuk pemberontakan yang baru.

Konteks internasional yang tertuang dalam posisi negara-negara lain dan organisasi regional terhadap masalah keamanan di Suriah juga memiliki pengaruh terhadap Kebijakan Bashar al-Assad selaku Presiden Suriah. Posisi beberapa negara ada yang menguntungkan rezim Assad ada juga yang menekannya. Menempatkan kebijakan dari Bashar al-Assad dalam mendorong kelompok oposisi keluar dari Suriah semakin mudah diwakili oleh negara aliansi seperti Rusia dan Iran, adapun negara lain yang memihak oposisi

adalah seperti Amerika Serikat. Akan tetapi kebijakannya itu menjadikan lebih banyak lagi resiko yang harus diterima negara Suriah. mulai dari sanksi internasional dan juga kematian warga sipil yang sangat tinggi. Persepsi dan peran dari negara lain pada tahun 2019-2020 terhadap konflik di Suriah dapat menjadi indikator kebijakan yang diambil oleh Presiden Bashar al-Assad dalam menangani masalah keamanan di Suriah.

Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis. Saran menyajikan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

Referensi

Semua rujukan-rujukan yang diacu di dalam teks artikel harus ditulis di bagian Referensi. Referensi harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari sumber primer (jurnal ilmiah dan berjumlah minimum 80% dari keseluruhan referensi) diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Sedangkan 20% dapat berisi artikel penelitian atau laporan penelitian (skripsi, tesis, buku, dan publikasi lainnya yang relevan). Sitasi bergaya APA dianjurkan menggunakan tools seperti Mendeley, Paperpile, dan lainnya.

Buku:

Andriole, Stephen J. 1979. "Decision Process Models and The Needs of Policy-Makers: Thoughts on the Foreign Policy Interface." Policy Sciences Vol.11 No.1. SPRINGER. Hal.19-37.

Cambanis, Thanassis dkk. 2019. "Hybrid Actors: Armed Groups and State Fragmentation in the Middle

- East.” New York: A Century Foundation Press. Hal.1-179.
- Cockburn, Patrick. 2016.”Saudia Arabian Intervening in the Syrian Civil War Would Risk Russian Wrath.” INDEPENDENT.
- Holiday, Joseph. 2013.”The Syrian Army Doctrinal Order of Battle.” Institute for The Study of War. United States of America.
- Huntington, Samuel P. 1996. *The Clash of Civilization and The Remaking of World Order*. New York: SIMON & SCHUSTER
- Khalaf, Rana.”Governance Without Government in Syria: Civil Society and State Building During Conflict.” Syria Studies. Hal. 1-36.
- Kinzer, Stephen. 2003. *All the Shah's Men: An American Coup and The Roots of Middle East terror*. New Jersey: John Willey ans Son
- Linkalter, Scot Burchill dan Andrew. 2012. *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- McGim, Jack. 2018.”Saudi Arabia and Iran Beyond Conflict and Ceexistence, Workshop Proceedings”. London: LSE (Middle East Center).
- Sorensen, Robert Jackson and George. 2011. *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- United Nations. 2004. *A More Secured World: Our Shared Responsibillity.Report of the Secretary-Genera's High-Level Panels on Threats, Challenges and Changes*. New York: United Nations Department of Public Information. Hal. 14.
- United Nations. 2011.*International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict*. New York dan Genewa:United Nations Publication.
- Artikel dalam jurnal atau majalah:**
- Abdin, Yassar. 2019.” The Fragility of Community Security in Damaskus and It's Environs.” Opinion Note, International Review of The Red Cross. Doi. 10.1017/S1816383119000109. Hal.1-29. Diakses pada 6 Juni 2021 di <https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-the-red-cross/article/abs/fragility-of-community-security-in-damascus-and-its-environs/07440AEE9CF9814B3E5025862EFDADBE>
- Afinotan, L. Andi.2014. “Decision Making in International Relations:A Theorerical Analysis.” CSCanada Canadian Social Science 10 No.5. 249-256. Doi.10.2968/4970.
- Afzal, Abdul Qadir Musshtaq dan Muhammad.2017.”Arab Spring: It's Causes and Consequences.” JPUHS1-10.
- Amaritasari, Indah. 2015.”Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional”. Jurnal Keamanan Nasional. Volume 1 No.2. Hal.153-172.
- Anderson, Tim.2016.”Syria: Bashar al-Assad and Political Reform”. Researchgate. Hal.1-8

- Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs. 2013. "Iran Religious Elements of the 1979 Islamic Revolution." *Religion and Conflict Case Study Series* 1-19.
- Binder, William J. 2002. "USAWC STRATEGY RESEARCH PROJECT." *Strategic Implication for US Policy in Iraq: What Now?* 1-38.
- Blanga, Yehuda U. 2017. "Saudi Arabia's Motives in the Syrian Civil War." *Middle East Policy*. Vol. XXIV No. 4.
- Booth, ken. 2007. *Theory of World Security*. New York: Cambridge University Press.
- Chatterjee, Subhrajit. 2017. "The Resurgence of Religion in the Age of Globalization." *Pratidhwani The Echo* 1-15.
- Cresswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Dawson, Stephen. 2015. "The Religious Resurgence: Problems and Opportunities for International Relations Theory." *E International Relation*.
- Devadas, Sharmila, Ibrahim Elbadawi, Norman V. Loayza. 2019. "Growth After War in Syria." *POLICY RESEARCH WORKING PAPER* 8967. HAL. 1-45.
- Djarmiko, Ahmad. 2017. "Kebangkitan Agama dan Prasangka Sekuler dalam Kajian Hubungan Internasional." *Pusdiklat Kementrian Luar Negeri* 5-16.
- El Hussein, Rola. 2010. "Hezbollah and The Axis of Refusal: Hamas, Iran and Syria." *Third World Quarterly*. Vol. 31, No. 5. doi.10.1080/01436597.2010.502695. Hal. 803-815.
- Evans, Gareth. 2016. "Responsibility to Protect (R2P): The ICISS Commission Fifteen Years On." *Jurnal Simons Papers in Security and Development of School for International Studies*. No. 54.
- Fitria, Vita. 2009. "Konflik Peradaban Samuel P. Huntington (Kebangkitan Islam yang Dirisaukan?)." *HUMANIKA* 39-52.
- Gittis, Daniel P. 2019. "Exploring Sunni and Shiite History, Demographics, and Relations." *Researchgate* 1-24.
- Golden, Dr. Sharon. 2017. "Qualitative Research." *Researchgate* 2-23.
- Goni, Cristina. 2017. *The Truth About Terror and youth Radicalization*. Oktober 27. <https://www.opensocietyfoundations.org/voices/truth-about-terror-and-youth-radicalization>.
- Haftendorn, Helga. 1991. "The Security Puzzle: Theory, Building and Discipline in International Security". *INTERNATIONAL STUDIES QUARTERLY*. Vol. 35, No. 1. Hal. 3-17.
- Hardi Alunaza SD, dkk. 2018. "The Pacific Solution As Australia's Policy Towards Asylum Seeker and Irregular Maritime Arrivals (IMAS) In The John Howards Era." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 61-75. doi: <http://dx.doi.org/10.26593/jihi.v14i1.2789>. 61-75.

- Hermawan, Sulistio. 2016. "Konflik di Suriah Pada Masa Bashar Al-Assad Tahun 2011-2015." *Jurnal Sejarah* 2-17.
- Hidayat, Rizal A. 2017. "Keamanan Manusia dalam Perspektif Studi Keamanan Kritis Terkait Perang Intra-Negara." *Intermestic: Journal of International Studies* 108-129.
- ICG Middle East Report. 2004. "Syria Under Bashar (II): Domestic Policy Challenge." Hal.1- 25
- Ing (Educating for Cultural Literacy and Mutual Respect). 2020. "An Overview of ISIS."
- Ivan Briscoe, Floor Janssen and Rosan Smith. 2012. "Stability and Economic Recovery After Assad: Key Steps for Syria's Post-Conflict Transition." *Clingendael: Netherlands Institute of International Relations* 1-51.
- Juneau, Thomas. 2018. "Iran's Costly Intervention in Syria: A Pyrrhic Victory." *Mediterranean Politics* 12-23.
- Kaplan, Morton A. 1966. "The New Great Debate: Traditionalism Vs. Science in International Relation." *World Politics* 1-20.
- Kasapoglu, Can. 2021. "The Syrian National Army and the Future of Turkey's Frontier Land Force." "Publication: Terrorism Monitor. Vol.19 Issue.5. The JAMESTOWN Foundation: Global Research and Analysis. Diakses pada <https://jamestown.org/program/the-syrian-national-army-and-the-future-of-turkeys-frontier-land-force/>
- Khan, Hafeez Ullah Khan dan Waseem. 2017. "Syria: History, The Civil War and Peace Prospects." *Journal of Political Studies* 587-601.
- Khatib, Lina. 2014. "A Comprehensive Strategy for Syria: Next Steps for The West." Policy Outlook of Carnegie Middle East Center. Hal.1-8.
- Konyukhovsky, dkk. 2018. "Proxy War." *ECONSTOR* 1-28.
- Kuhn, Florian P. 2011. "Securing Uncertainty: Sub-state Security Dilemma and the Risk of Intervention." *SAGE JOURNAL(sagepub)* 363-380. Accessed januari 16, 2021. doi:10.1177/0047117811416289.
- Lea, Jed., Henry. 2018. "Responsibility to Protect (R2P) and the Problem of Political Will." *Jurnal Polish Political Science Yearbook of Vignan University India*. Vol.47. Hal.553- 570.
- Liota P.H, Libat. 2002. "Boomerang Effect: The Convergence of National and Human Security". *SECURITY DIALOGUE*. Vol.33. No.4. hal. 1-49
- Mamdud, Rijal. 2017. "Bashar al-Assad dan Kelompok Oposisi: Telaah terhadap Representasi Konflik Suriah Pasca Arab Spring." *Jurnal Lentera*. Vol:1.No.2, 2 Desember.
- Marais, SM Turpin and MA. 2004. "Decision Making: Theory and Practice." *ORION* 143- 158.
- Moghaddam, Assaf dkk. 2003. "A Global Resurgence of Religion?" *Researchgate* 1-72.

- Morris, K. 2012. "The Arab Spring: The Rise of Human Security and the Fall of Dictatorship." Internet Journal of Criminology. Hal.1
- Mudore, Syarif Bahauddin., dan Nurlaila Safitri. 2019."Dinamika Perang Suriah: Aktor dan Kepentingan." POLITEA: Jurnal Kajian Politik Islam Vol.2 No.2. Hal.66-89.
- Muhammad, Mahadhir. 2016. "Kebijakan Politik Bashar Al-Assad di Suriah." *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6 (1): 84-141. Accessed Januari 1, 2021.
- Mukhtar, Sidaratahta. 2011."Keamanan Nasional dan Prakteknya di Indonesia." *Sociae Polites*, Edisi Khusus. Hal.127-137.
- Mustahyun. 2017. "Rivalitas Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah Pada Arab Spring Suriah Tahun 2011-2016." *Jurnal UMY* 1-21.
- Norilla., dan Eddy Mulyono.2018."Responsibility to Protect sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN." *Jurnal Lentera Hukum Universitas Jember Indonesia*. Vol.5.Issue 1. Hal.17-30.
- Nugraha, Lalu Guna. 2020. "Penerapan Responsibility to Protect (RTOP) sebagai Bentuk Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata." *Jurnal Jatiswara* 35:78-87.
- Olsson, Tord., Ozdalga, Elizabeth., Raudvere, Catharina.1996."Alevi Identity: Cultural Religious and Social Perspectives." Vol.8.
- Permatasari, Anggalia Putri. 2007.
- "Keamanan dalam Studi Hubungan Internasional." *Hubungan Internasional-Universitas Padjajaran* 1-15.
- Prasetya, Andistya Oktaning Listra dan Ferry. 2012. "Krisis Politik Timur Tengah Serta Implikasinya Terhadap Perdagangan dan Fluktuasi Minyak Dunia."1-9.
- Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D. 2008. "Dinamika Keamanan dalam Hubungan Internasional dan Implikasinya bagi Indonesia." *E-journal UNPAR* 1-49.
- Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D.2008."Dinamika Keamanan dalam Hubungan Internasional dan Implikasinya bagi Indonesia". Universitas Khatolik Parahyangan. Hal. 1-49.
- Riesebradt, Martin. 2014. "Religion in The Modern World: Between Secularization and Resurgence." *Max Weber Programme* 5-15.
- Rosyidin, Mohammad. 2015. "Konflik Internasional Abad Ke-21? Benturan antarnegara Demokrasi dan Masa Depan Politik Dunia." *JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 223-236
- Rydell, Moa. n.d. "Syria: Iran's and Saudi Arabia's New Playground? A Case Study of Iran's and Saudi Arabia's Involvement in Syrian Civil War." *Department of Political Science Lund University* 1-43.
- Safitri, Syarif Bahaudin Mudore dan Nurlaila. n.d. "Dinamika Perang Suriah: Aktor dan Kepentingan." *Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 1-26.
- Sahide, Ahmad. 2013. "Konflik Syi'ah-

- Sunni Pasca-The Arab Spring." *Kawistara* 1-11.
- Sahide, Ahmad., Syamsul Hadi., Siti Muti'ah Setiawati., dan Bambang Cipto. 2015. "The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya". *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol.4, No.2. Hal.118-129.
- Salloukh, Bassel F. 2009. "Demystifying Syrian Foreign Policy Under Bashar." *ResearchGate* 160-172. <https://www.researchgate.net/publication/278684972>.
- Setiaji, Bayu. 2011. "Masalah Keamanan dan Pengaman Situs Web Pemerintah". *JURNAL DASI*. Vol.12.No.2. 28-31
- Soesilowati, Sartika. 2011. "Sekuritisasi 'Manusia Perahu': Efektifkah?" *Global dan Strategis* 125-146.
- Sonmez, Seyhan. 2010. "Syrian Civil war from Critical Security Studies Perspective: 'A Case of The Security of The Ethnic and Sect Groups'-Current Issues of International Security." *Faculte de Sciences Economiques, Sociales, Politiques et de Communication (ESPO). Sciences Politiques et relations internationales (PSRI)*. Hal 1-12.
- Sugiyono, Prof.Dr. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Tasnur, Irvan. 2019. "Konflik Sunni-Syiah Pasca Arab Spring: Menelusuri Motif Politik dibalik Perang Berkepanjangan di Suriah." *e-journal Fisip Unjani* 1-12.
- Trihartono, Agus dkk. 2020. *Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional*. Depok: Melvana Publisher.
- Triutama, Reynaldi. 2018. "Analisis Perubahan Sikap Kenya Terhadap ARMS TRADE TREATY." *Journal of International Relations* 4: 841-848. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.
- Waefer, Ole. 1995. "Securitization and Desecuritization." In *On Security*, by Ronnie D. Lipschutz, 46-86. New York: Cambridge University Press.
- Wivel, Anders. 2011. "Security Dilemma." *International Encyclopedia of Political Science* (SAGE Publication) 7. Accessed Desember 30, 2020. doi:<https://doi.org/10.4135/9781412959636.n549>.
- Tulisan/berita dalam Koran (tanpa nama pengarang):**
- BBC News. 2020. "Syrian President Bashar al-Assad: Facing Down Rebellion." BBC News, 31 Agustus. Diakses pada 20 April 2021
- CNN, 2020. "ISIS Fast Facts." CNN Editorial Research. diakses pada 11 April 2021 di <https://edition.cnn.com/2014/08/08/world/isis-fast-facts/index.html>
- factbook, CIA World. 2020. "Countries of The World." *Syria Economy 2020*. January 27. Accessed Desember 5, 2020. https://theodora.com/wfbcurrent/syria/syria_economy.html.
- Factbook, CIA World. 2020. "Syria Economic 2020." *Countries of the World*. Januari 27. Accessed Desember 5, 2020.

- https://theodora.com/wfbcurrent/syria/syria_economy.html.
- GFP. 2020. *Syria Military Strength (2020)*. Desember 6. Accessed Desember 6, 2020.
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=syria.
- HNO (Humanitarian Needs Overview). 2019."Syrian Arab Republic." Diakses pada 6 Juni 2021 di https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Syr_HNO_Ful.pdf
- HRW (Human Right Watch). 2020."Syria Events 2019." Diakses pada 5 Juni 2021 di <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/syria#>
- HRW (Human Right Watch). 2020."Targetting Life in Idlib: Syrian and Russian Strikes on Civilian Infrastructure." Diakses pada 6 Juni 2021 di <https://www.hrw.org/report/2020/10/15/targeting-life-idlib/syrian-and-russian-strikes-civilian-infrastructure>
- Indonesia, News BBC. 2019."Diperangi Erdogan, tak diakui di Suriah, Siapa Sebenarnya Bangsa Kurdi?." Diakses pada 30 Mei 2021 di <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50068256>
- News, BBC. 2019."Syria War:L Suspected Israeli Strikes on Iran-Linked Targets 'Kill Dozens' Syrian Civil War 2019." 13 Januari. Diakses pada 30 Mei 2021 di www.bbc.com
- News, BBC. 2020."Syria Conflict:'Flagrant' War Committed in Idlib Battle, UN Says." Diakses pada 6 Juni 2021 di <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53322857>
- News, BBC. 2020."Syria War: Why Does the Battle for Idlib Matter?" 18 Februari, diakses pada 10 Januari 2021 di <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45403334>
- News, BBC. 2020."Why Has The Syrian War Lasted 10 Years." Diakses pada 23 April 2021 pada www.bbc.com
- The World Bank. 2021."The world Bank in Syrian Arab Republic." <https://www.worldbank.org/en/country/syria/overview>
- U.S Department of State. 2017."Syria Sanction." Diakses pada 6 Juni 2021 di <https://www.state.gov/syria-sanctions/>
- U.S Department of State. 2021."Background Briefing With Senior State Department Official." Special Briefing Via Telephone. Diakses pada 6 Juni 2021 di <https://www.state.gov/background-briefing-with-senior-state-department-official/>
- United States Institute of Peace.2020."The Current Situation in Syria: A USIP Fact Sheet".USIP, agustus. Diakses pada 21 Maret 2021. <https://www.usip.org/publications/2020/08/current-situation-syria>
- WH.GOV."The Biography for President Trump and Past President is Courtesy of the White House Historical Association.". diakses 20 April pada <https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/donald-j-trump/>
- World Politics Review. 2021."The Syrian Civil War's Never-Ending Endgame." Diakses pada 5 Juni 2021 di

<https://www.worldpoliticsreview.com/insights/28041/the-syria-civil-war-might-be-ending-but-the-crisis-will-live-on>

Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:

- Andini, Kurnia. 2017. "German Government's Response Toward Refugee and It's Effects in 2014-2016." *Undergraduate Thesis* (Repository UMY) 1-11. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11778>.
- Ardhiyanto, Dhimas. 2014. "Kebijakan Liga Arab dalam Konflik Suriah: Studi Kasus Dukungan Liga Arab pada Pihak Oposisi Suriah Tahun 2013." *Skripsi* 12-100.
- Efendi, Ari Wibowo. 2014. "Implementasi Kebijakan Pelarangan Buku Era Reformasi di Indonesia Studi atas Pelarangan Buku Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965." *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*. 1-89. <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/23963>
- Lesnussa, Umiati. 2017. "Jerman Sebagai Negara Tujuan Utama Pengungsi Suriah di Eropa (2015)." *SKRIPSI* 1-55. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11778>.
- Ramadhansyah, Hafidz. 2017. "Peran Kepemimpinan Bashar al-Assad terhadap Konflik di Suriah 2011-2015." *SKRIPSI UNS*.
- Rini, Endang Agus Setya. 2017. "Keterkaitan Konflik Sunni-Syiah dalam Konflik Suriah Pada Masa Bashar Al-Assad (2011-2016)." *Jurnal Skripsi* 1-22.
- Roman, Erik. 2018. "Penyelesaian Perbedaan Pendapat antara Atasan yang Berhak Menghukum dan Oditur Militer Mengenai Penghentian Penyidikan". *SKRIPSI*. 1-51.
- Rosyada, Arina Nuri Alfi. 2017. "Keberhasilan Bashar Al-Assad dalam Mempertahankan Kekuasaannya di Suriah (2011-2016)." *Skripsi* (Department of International Relation) 1-18. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12007>.
- Abosedra, salah., Fakih, Ali., Haimon, Nathir. 2021. "Ethnic Divisions and The Onset of Civil War in Syria." *ECONSTOR*.
- Mustahyun S.Hum. 2017. "Intervensi Saudi-Iran dalam Konflik Suriah." *Thesis Program Study Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Kajian Timur Tengah* 8-48
- Panaite, Atena C. 2017. "Cold War in the Middle east: Iran and Saudi Arabia." *Theses and Dissertation* 8-132.
- Rousseau, Elliott. 2014. "The Construction of Ethnoreligious Identity Groups in Syria: Loyalties and Tensions in the Syria Civil War. Honors Program Theses and Projects. Btldgewater State University. Hal.1-5
- Laporan :**
- Assessment, Intelligence. 2003. "Iran: The Shia Revolution and Iran's Neighbors." *National Foreign Assessment Center* 1-18.
- Blanchard, Carla E. Humud dan Christopher M. 2020. *Armed Conflict in Syria: Overview and U.S Response*. Direction of Congress, Congressional Research Service (CRS), US Government, CRS, 1-49. Accessed November 24, 2020.

<https://crsreports.congress.gov>.

Division, Federal Research. 2005.
"Country Profile: Syria." *Library of Congress* 1-23.

EASO. 2019." Syria Actors." Country of
Origin Information Report. Hal.1-86.

Mariwala, Arnaf. 2014. "The Syrian Civil
War: Regime of Bashar Al-Assad."
Stanford Model United Nations Conference 6-23.

McGim, Jack. 2018. "Saudi Arabia and
Iran Beyond Conflict an Ceoxistence."
Workshop Proceedings.
London: LSE (Middle East Centre).

Meijnders, Minke., Jair Van der Lijn., Bas
van Mierlo. 2017."Syria in 2019: Four
Scenarios. Implications for
Policy Planning". *Clingendael*, November.
1-42

Office, European Asylum Support. 2020.
Syria Security Situation: Country of

Origin Information

Report.European Asylum Support Office
(EASO).

Office, European Asylum Support. 2020.
*Syria Socio-Economic Situation:
Damascus city*. Ugurhan: EASO.

Office, European Asylum Support.
2021."Syria Military Service". Country of
Origin Information Report. doi:
10.2847/461371.

Sahmoun, Gareth Evans dan Mohamed.
2001. *The Responsibility to Protect Report
of The International Comission on
Intervention and State Sovereignty
(ICISS)*. Canada: International
Development Research Centre.

Syria Study Group. 2019."Final Report
and Recomendation: Syria Study Group".
Hal.1-9.

